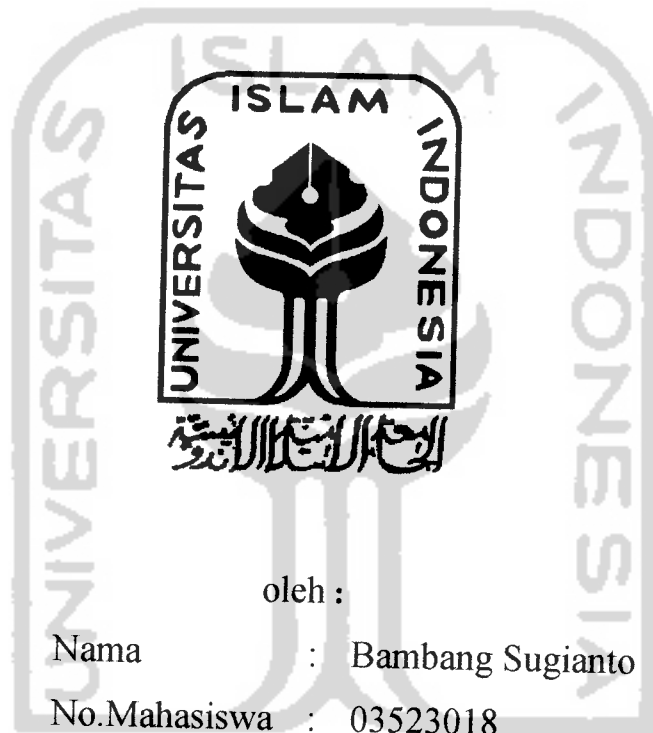


E-GOVERNMENT

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Jurusan Teknik Informatika



oleh :

Nama : Bambang Sugianto

No.Mahasiswa : 03523018

**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2007

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

E-GOVERNMENT

TUGAS AKHIR

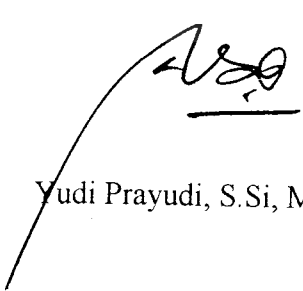


oleh :

Nama : Bambang Sugianto
No. Mahasiswa : 03523018

Yogyakarta, Januari 2007

Pembimbing I



Yudi Prayudi, S.Si, M.Kom

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN HASIL TUGAS AKHIR

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Bambang Sugianto

No. Mahasiswa : 03523018

Menyatakan bahwa seluruh komponen dan isi dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ada beberapa bagian dari karya ini adalah bukan hasil karya saya sendiri, maka saya siap menanggung resiko dan konsekuensi apapun.

Demikian pernyataan ini saya buat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Januari 2007

Bambang Sugianto



LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

E-GOVERNMENT

TUGAS AKHIR

Oleh :

Nama : Bambang Sugianto

No. Mahasiswa : 03523018

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknologi
Industri Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, Januari 2007

Tim Penguji,

Yudi Prayudi, S.Si, M.Kom
Ketua

Taufiq Hidayat, ST, MCS
Anggota I

Hendrik, ST
Anggota II

Mengetahui,

Ketua Jurusan Teknik Informatika

Teknologi Industri

Universitas Islam Indonesia



Yudi, S.Si, M.Kom

MOTTO

- ❖ Dengan memaksimalkan sumber yang minimal, selalu mencoba membuat sebuah karya sederhana yang berarti.
- ❖ Think Big. Start Small. Scale Fast. Deliver Value !



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan kali ini penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Yudi Prayudi, S.Si, M.Kom selaku dosen pembimbing dan ketua Jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Indonesia.
2. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan dukungan yang maksimal.
3. Pak Turyono, Mba'Asih, Ulfa, Nisa yang selalu mendukung setiap langkahku.
4. Mas Basuki yang selalu memberiku semangat untuk terus maju dan pantang menyerah dalam berusaha.
5. Avina Adenita yang dengan sabar membimbing dan telah memberi inspirasi dalam hatiku.
6. Orang-orang yang telah menurunkan ilmu *programming*-nya padaku Taufiq Hidayat (Piex), Mas Andi, Mas Yudi.
7. Rekan-rekan yang selalu setia menemaniku dalam keadaan apapun : Agus, Merdha, Esty, Betty *cute*, Mba' Lulus, Wisoko, Ferdi, Mas Dinar, Wakhid, Lia, Iwan Jebeng.

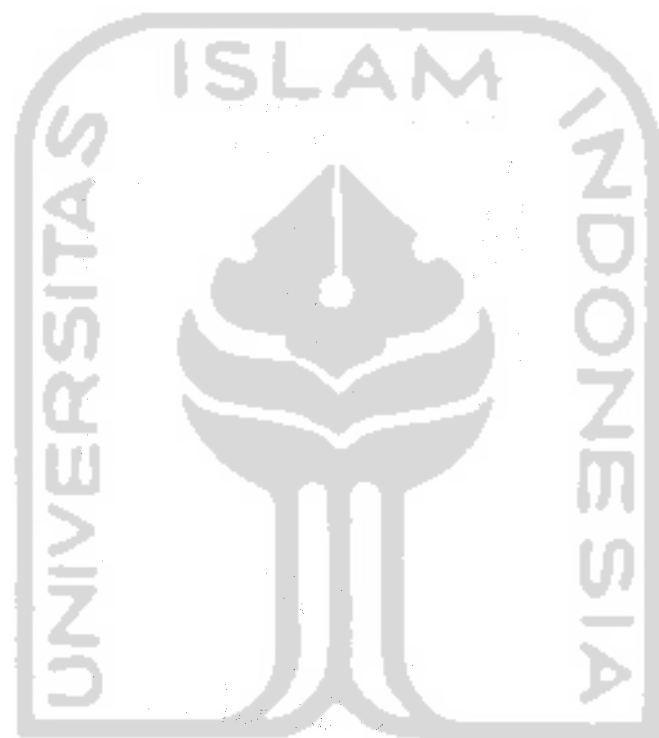
Penulis menyadari dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis butuhkan demi kesempurnaan penulisan ini.

Akhirnya kepada Allah jualah kita kembalikan segala perkara.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, Januari 2007

Penulis



جامعة الإسلام في إندونيسيا

Tugas Akhir Non Skripsi

KONSEP E-GOVERNMENT

Bambang Sugianto (03 523 018)

Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia

E-mail: the_babbra@yahoo.com

ABSTRAKS

Sistem informasi pemerintahan dipergunakan dalam praktek lembaga pemerintahan dalam semua bidang tugas dan fungsi Pemerintah yang didalamnya terdiri dari beberapa segi, seperti pemerintahan, tata usaha negara, pengurusan rumah tangga negara dan pembangunan. Sistem informasi dalam praktek pemerintahan merupakan sistem informasi manajemen dimana didalamnya terdapat proses pengolahan suatu informasi yang diperuntukkan untuk keperluan pengambilan keputusan dari suatu lembaga pemerintahan, dan karena peran pemerintah berkaitan dengan kepentingan publik maka segala sistem informasi yang dipergunakan harus memenuhi syarat efisien, efektif dan ekonomis. Dari konsep yang demikianlah maka mulai diterapkan penggunaan teknologi dalam sistem informasi pemerintahan.

Kata kunci:: Sistem informasi pemerintahan, praktek lembaga pemerintahan, tata usaha negara.

1. PENDAHULUAN

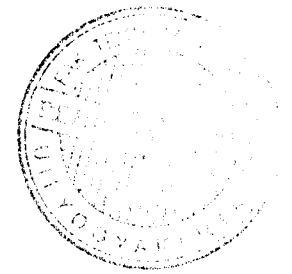
Perkembangan situasi yang saat ini tengah dihadapi oleh pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah membutuhkan ketepatan dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut akan menjadi sangat strategis guna menghadapi setiap tantangan yang dihadapi dalam rangka pengelolaan negara. Untuk itu dibutuhkan layanan informasi pemerintahan yang dapat dengan cepat, tepat, akurat dan handal memberikan setiap informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengambilan keputusan. Setiap fungsi manajemen dalam pemerintahan menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan dan pengendalian membutuhkan informasi yang sesuai dengan fungsi yang diemban oleh setiap instansi maupun lembaga pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah. Namun sistem informasi manajemen pemerintahan yang baik dan handal haruslah merupakan suatu sistem informasi yang terintegrasi dari semua bidang

pemerintahan dan merupakan hasil analisa yang bersifat ikhtisaran dari data-data yang berasal dari sumber yang terpadu. Keterpaduan sistem akan mengarah kepada suatu struktur data yang bersifat universal dan dapat dimanfaatkan secara kolektif oleh seluruh bidang yang terkait sehingga akan menjamin validitas informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi tersebut.

Seiring dengan perkembangan teknologi di bidang sistem informasi, penyajian informasi di bidang pemerintahan telah dapat dilakukan secara elektronis. Saat ini telah beragam aplikasi diterapkan guna mengolah setiap data yang berkaitan dengan masalah pemerintahan sehingga menjadi informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan. Penerapan aplikasi dilakukan pada tingkat pusat dan daerah dengan beragam bidang dan wewenang. Namun pengembangan aplikasi dibidang pemerintahan dilakukan secara sporadis dan dilakukan dalam masing-masing lingkup bidang pemerintahan, hal ini membawa akibat terbentuknya sistem-sistem yang berdiri secara sendiri-sendiri. Konstelasi sistem yang terbentuk secara sporadis tersebut, secara maya telah membentuk suatu kepulauan sistem informasi yang terpisah-pisah dan berdiri sendiri. Dimana masing-masing pulau sistem memiliki struktur data, bisnis proses dan teknologi yang berbeda diantara satu dengan lainnya. Hal ini membawa dampak tidak terintegrasinya sistem informasi pemerintahan dan mengakibatkan terjadinya duplikasi dan redudansi data. Berakibat juga kepada tidak efektif dan efisiennya sistem informasi yang dimiliki oleh pemerintah dan akan membawa akibat kepada berkurangnya efektifitas informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dan tentunya akan mengurangi manfaat yang dibutuhkan dalam rangka pengambilan keputusan.

Dengan terbentuknya konfigurasi sistem informasi yang tidak berada dalam satu konteks sistem informasi terintegrasi mengakibatkan terputusnya mata rantai pengelolaan data dan informasi dalam arus informasi pemerintahan sehingga mengakibatkan informasi yang dihasilkan tidak sebagaimana yang diharapkan.

Kesemua hal tersebut terjadi sebagai akibat belum adanya suatu acuan pengembangan (*guidelines*) yang bersifat komprehensif dan mencakup integrasi



serta interaksi seluruh sistem yang dibutuhkan oleh pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah. Acuan pengembangan tersebut dibutuhkan oleh seluruh instansi maupun lembaga pemerintah ditingkat pusat dan daerah untuk dapat membangun rancang bangun cetak biru sistem informasi yang dapat berinteraksi dengan instansi maupun lembaga lain yang terkait dengan struktur data yang berada dalam kewenangan instansi yang bersangkutan.

2. TUJUAN

Penelitian yang dilakukan terkait dengan konsep *e-Government*, bertujuan antara lain untuk memahami karakteristik dari konseptual *e-Government* dan penerapannya dalam pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dalam operasional dan meningkatkan mutu pelayanan publik.

3. LANDASAN TEORI

3.1 Definisi

Definisi dari *e-Government* sering digambarkan atau dideskripsikan secara cukup beragam oleh masing-masing individu atau komunitas. Hal ini disebabkan karena berbagai hal¹:

- Walaupun sebagai sebuah konsep, *e-Government* memiliki prinsip-prinsip dasar yang universal. Namun karena setiap negara memiliki scenario implementasi atau penerapan yang berbeda, maka definisi dari ruang lingkup *e-Government* menjadi beraneka ragam.
- Spektrum implementasi aplikasi *e-Government* sangatlah lebar mengingat sedemikian banyaknya tugas dan tanggung jawab pemerintah sebuah negara yang berfungsi untuk mengatur masyarakatnya melalui berbagai jenis interaksi dan transaksi.
- Pengertian dan penerapan *e-Government* di sebuah negara tidak dapat dipisahkan dengan kondisi internal baik secara makro maupun mikro dari

¹ Richardus Eko Indrajit, **Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital**, ANDI, 2002, hlm. 1-2

negara yang bersangkutan, sehingga pemahamannya teramat sangat ditentukan oleh sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, dan kondisi ekonomi dari negara yang bersangkutan.

- Visi, misi dan strategi pembangunan sebuah negara yang sangat unik mengakibatkan terjadinya beragam pendekatan dan scenario dalam proses pengembangan bangsa sehingga berpengaruh terhadap penyusunan prioritas pengembangan bangsa.

Berikut adalah bagaimana lembaga-lembaga non-pemerintah memandang ruang lingkup dan domain dari e-Government²:

- Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan e-Government sebagai berikut :
E-Government refers to use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses and another arms of government.
- UNDP (United Nation Development Programme) dalam suatu kesempatan mendefinisikannya secara lebih sederhana, yaitu:
E-Government the application of Information and Communication Technology (ICT) by government agencies.
- Sementara itu vendor perangkat lunak terkemuka semacam SAP memiliki definisi yang cukup unik, yaitu:
E-Government is global reform movement to promote internet use by government agencies and everyone who deals with them.
- Janet Caldw, direktur dari Institute for Electronic Government (IBM Corporation) dari hasil kajiannya bersama Kennedy School of Government, Havard University memberikan sebuah definisi yang menarik, yaitu:

² Richardus Eko Indrajit, **Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital**, ANDI, 2002, hlm. 2-3

Electronic government is nothing short of a fundamental transformation of government and governance at a scale we have not witnessed since the beginning of the industrial era.

- Jim Flyzik (US Department of Treasury) ketika diwawancarai oleh Price Waterhouse Coopers mendefinisikan :

E-Government is about bringing the government into the world of the Internet and work on Internet time.

Masalah definisi ini merupakan hal yang penting, karena akan menjadi bahasa seragam bagi para konseptor maupun praktisi yang berkepentingan dalam menyusun dan mengimplementasikan *e-Government* di suatu negara. Terkadang definisi yang terlalu sempit akan mengurangi atau bahkan meniadakan berbagai peluang yang ditawarkan oleh *e-Government*, sementara definisi yang terlalu luas dan mengambang akan menghilangkan nilai manfaat yang ditawarkan *e-Government*.

3.2 Manfaat *e-Government*

Tanpa mengecilkkan arti dari beragam contoh definisi yang telah dipaparkan sebelumnya, setidaknya ada tiga kesamaan karakteristik dari setiap definisi *e-Government* yaitu³ :

- Merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (*stakeholder*).
- Melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet).
- Memperbaiki mutu pelayanan yang lebih baik.

Manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya *e-Government* bagi suatu negara antara lain⁴ :

³ Richardus Eko Indrajit, **Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital**, ANDI, 2002, hlm. 4-5

⁴ Richardus Eko Indrajit, **Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital**, ANDI, 2002, hlm. 5

- Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektifitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.
- Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan *Good Cooperate Governance*.
- Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
- Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
- Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada.
- Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan public secara merata dan demokratis.

3.3 *Visi e-Government*

Visi e-Government yang baik akan berlandaskan pada empat prinsip utama, yaitu⁵:

- Prinsip pertama: fokus pada perbaikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Karena begitu banyaknya jenis pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakatnya, maka harus dipikirkan pelayanan mana yang harus menjadi prioritas. Prioritas pelayanan yang dimaksud adalah:
 - Memiliki sumber transaksi yang besar dan melibatkan banyak sumber daya manusia.

⁵ Richardus Eko Indrajit, **Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital**, ANDI, 2002, hlm. 11-13

- Membutuhkan interaksi dua arah antara pemerintah dengan masyarakatnya (tidak hanya bersifat satu arah seperti pemberian informasi dan publikasi).
- Memungkinkan terjadinya kerja sama antara pemerintah dengan kalangan lain seperti institusi swasta dan lembaga non-komersial lain.
- Prinsip kedua: membangun sebuah lingkungan yang kompetitif yaitu dalam melayani masyarakat tidak hanya diserahkan pada pemerintah saja tetapi sektor swasta dan lembaga non-komersial diberikan kesempatan untuk melakukannya. Dengan demikian pemerintah dapat bersaing dengan sektor ini dalam upaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dalam persaingan tersebut harus mampu membuat sebuah lingkungan kompetisi yang adil, obyektif, tidak memihak, dan kondusif bagi ercapainya *e-Government*.
- Prinsip ketiga: pemberian penghargaan pada inovasi dan ruang kesempatan bagi kesalahan. Konsep *e-Government* merupakan pendekatan yang masih baru, dimana semua bangsa dan negara sedang melukan eksperimen. Pemberian penghargaan bagi mereka yang berhasil menerapkan inisiatif *e-Government* di tempat mereka bekerja.
- Prinsip keempat: prinsip ini penekanannya pada pencapaian efisiensi. Pemberian pelayanan dengan memanfaatkan teknologi digital atau internet tidak selamanya menjadi kanal konvensional karena setelah masyarakat terbiasa menggunakan kanal digital, jalur tradisional harus dihapuskan agar pemerintah menjadi efisien.

3.4 Elemen sukses pengembangan e-Government

Menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government, untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen

sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Elemen-elemen yang dimaksud adalah⁶:

- Support

Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan e-Government, bukan hanya sekedar mengikuti trend atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip e-Government. Tanda-tanda adanya kesiapan berasal dari terdapatnya pemimpin dari pemerintahan yang memperlihatkan *political will* untuk mempromosikan pengimplementasian e-Government. Yang dimaksud dengan adanya *political will* disini adalah⁷:

- Dukungan kepemimpinan politik yang memiliki komitmen yang berkelanjutan
- Ketersediaan alokasi dana yang telah dianggarkan dan siap untuk dicairkan
- Kesiapan untuk melakukan koordinasi lintas sektoral
- Niat untuk mulai menyusun undang-undang atau peraturan untuk mendukung inisiatif yang ada dan memberlakukannya
- Kesiapan dari seluruh SDM pemerintah untuk belajar dan mengubah cara kerjanya sesuai dengan transformasi yang diinginkan
- Usaha untuk mensistemkan atau menginsitusalisasikan konsep e-Government agar inisiatif ini dapat berlangsung secara terus-menerus(memiliki *sustainability* yang tinggi).

- Capacity

⁶ Richardus Eko Indrajit, **Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital**, ANDI, 2002, hlm. 15-18

⁷ Richardus Eko Indrajit, **e-Government In Action: Ragam Kasus Implementasi Sukses Di Berbagai Belahan Dunia**, ANDI, 2002, hlm.10

Adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan e-Government menjadi kenyataan. Berikut adalah hal-hal yang harus dimiliki pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu:

- Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif e-Government, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial.
 - Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep e-Government.
 - Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e-Government dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.
- Value

Berbagai inisiatif e-Government tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan. Dalam menentukan besar atau tidaknya manfaat e-Government ditentukan oleh kalangan pemerintah, masyarakat, dan mereka yang berkepentingan (*Demand Side*). Ketelitian pemerintah dalam memilih prioritas jenis aplikasi e-Government akan memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Kesalahan dalam menentukan kebutuhan masyarakat, akan menjadikan awal dari kegagalan bagi pemerintah yang akan semakin mempersulit meneruskan usaha mengembangkan e-Government.

4. Implementasi e-Government di Indonesia

4.1 Kebijakan e-Government di Indonesia

E-Government merupakan program pemerintah dalam upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik serta

melakukan transformasi guna memfasilitasi kegiatan masyarakat dan kalangan bisnis untuk mewujudkan perekonomian berbasis pengetahuan (*knowledgebased economy*). Melalui pengembangan *e-Government*, pemerintah mengharapkan dapat dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah otonom dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi. Untuk implementasi *e-Government*, pemerintah telah mengeluarkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* yang dituangkan melalui INPRES No. 3 tahun 2003. Isi dari INPRES yang dikeluarkan pada tanggal 9 Juni 2003 oleh presiden Megawati Soekarnoputri adalah :

- a. Bahwa kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat.
- b. Bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (*e-Government*) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan *e-Government*.
- d. Bahwa dalam pelaksanaannya diperlukan kesamaan pemahaman, keserempakan tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur kelembagaan pemerintah, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden bagi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan *e-Government* secara nasional.

Keempat kebijakan dan strategi nasional dalam pengembangan *e-Government* di Indonesia tersebut di instruksikan kepada :

1. Menteri.
2. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen
3. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

6. Jaksa Agung Republik Indonesia
7. Gubernur
8. Bupati/Walikota.

4.2 Kondisi e-Government di Indonesia

Perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang ada saat ini ke suatu bentuk sistem organisasi jaringan dengan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi tidaklah semudah yang diharapkan, karena adanya sejumlah hambatan pada operasionalnya, antara lain:

- Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pada instansi pemerintah yang sangat terbatas (belum siap menerima perubahan kultur ke teknologi informasi komunikasi).
- Kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai (tidak adanya *IT master plan* dan *grand strategy e-gov*).
- Struktur organisasi pengelolaan e-Government yang belum memadai.
- Kurang tersedianya anggaran operasional yang memadai (akibat kurangnya pemahaman tentang pentingnya pembangunan teknologi informasi dan komunikasi).
- Kurang adanya perhatian/kepedulian pejabat pemerintah di dalam pembangunan dan pengembangan e-Government (diperlukan manajemen perubahan).

4.3 Kualitas Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) tahun 2003 jumlah Pegawai Negeri Sipil adalah 3.648.005 dengan tingkat pendidikan sebagai berikut:

- Sekolah Dasar 3.4 %
- Sekolah Lanjutan Pertama 2.8 %
- Sekolah Lanjutan Atas 38.2 %
- Diploma (I, II, III, IV, Sarjana Muda) 25.7 %
- Sarjana 27.0 %
- Pasca Sarjana 2.5 %
- Doktor 0.3 %

Dalam proses implementasi e-Government, masalah ketersediaan sumberdaya manusia yang mempunyai standar kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi jauh lebih sulit untuk dihadapi dibandingkan dengan masalah teknologinya. Pada sejumlah kantor pemerintah daerah, PNS yang mempunyai kemampuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi sekitar 3-5 orang saja, dan umumnya tidak berlatar belakang pendidikan sarjana bidang Informatika atau Elektro. Hal ini mungkin saja terjadi mengingat selama 10-20 tahun yang lalu jarang pemerintah daerah merekrut pegawai baru dengan latar belakang bidang teknologi informasi dan komunikasi.

4.4 Ketersediaan Sarana dan prasarana

Di dalam menunjang pembangunan dan pengembangan e-Government di daerah, pengadaan sarana dan prasarana penunjang e-Government merupakan syarat utama yang harus dilaksanakan. Sekitar 55% pemerintah daerah yang telah mengklaim mempunyai strategi dan implementasi egovernment, sedang sisanya belum memiliki strategi di dalam mengimplementasikan e-Government, hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Kurang tersedianya akses komunikasi yang memadai.
- Pengembangan teknologi informasi belum merupakan skala prioritas di dalam pembangunan daerahnya.
- Kantor/dinas/badan di pemerintah daerah yang menangani teknologi informasi dan komunikasi sebagian besar eselon III (82%) dan eselon II (18%), sehingga akses ke pimpinan pemerintahan daerah cukup sulit.

4.5 Kondisi Insfrastruktur Jaringan

Kondisi infrastruktur yang belum memadai dan mahal merupakan salah satu hambatan di dalam implementasi e-Government di kantor pemerintah daerah. Sebagian besar kantor pemerintah daerah sudah memiliki koneksi LAN dan sebagian kecil yang telah memiliki koneksi WAN. Meskipun sudah memiliki koneksi LAN di kantor pemerintah daerah, tetapi pertukaran data melalui komunikasi data belum banyak dilakukan, mengingat ketiadaan data dan

informasi yang diharapkan karena masih rendahnya konsepsi basis datanya. Instansi pemerintah di daerah secara sekilas tidak mempunyai pilihan yang terlalu banyak untuk dapat melakukan koneksi ke Internet. Telkomnet Instan memiliki pangsa terbesar di dalam akses Internet di kantor-kantor pemerintah daerah.

4.5 Anggaran e-Government di Pemerintah Daerah

Tidak semua pemerintah daerah mampu memasukkan anggaran e-Government pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah. Hal tersebut antara lain karena:

- Belum merupakan skala prioritas di dalam pembangunan daerahnya;
- Ketidakmampuan (pembuatan TOR) di dalam meyakinkan DPRD mengenai anggaran yang diusulkan untuk pembangunan e-Government;
- Perlunya anggaran yang cukup besar untuk pembangunan e-Government di daerah. Berdasarkan pengamatan di lapangan, ada korelasi antara pembangunan e-Government dengan orang yang menjadi pemimpin daerah. Seorang pemimpin daerah yang memahami dan mengetahui kemampuan teknologi informasi, umumnya pembangunan e-Government di daerahnya relatif lebih maju.

4.6 Kepedulian Pejabat Daerah Pada e-Government

Di Indonesia, kelahiran *e-Government* dibidani oleh INPRES No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. INPRES ini cukup merangsang lahirnya e-Government di Indonesia, tetapi secara kualitatif dan kuantitatif, peranan e-Government di dalam roda pemerintahan belum terasa manfaatnya terhadap masyarakat. Salah satu penyebab belum terlaksananya implementasi e-Government di sejumlah daerah adalah faktor tingkat kepedulian pemimpin atau pejabat di daerah.

Dalam kontekstual kenegaraan, peran kepemimpinan adalah sangat besar, atau malah dapat dikatakan sangat krusial. Tidak akan terjadi perubahan tanpa dorongan inisiatif dari seorang pemimpin untuk melakukan perubahan, baik yang datang dari dalam maupun intervensi dari luar. Pendapat bahwa hanya dengan inisiatif dan komitmen dari pemimpin sudah cukup untuk mensukseskan perubahan, tidaklah sepenuhnya benar. Memang dukungan pimpinan puncak

sangat penting, tetapi harus diingat bahwa struktur organisasi pemerintahan daerah memiliki kedalaman struktur organisasi yang cukup besar. Jadi selain kepemimpinan puncak, perlu juga diperhatikan pemimpin-pemimpin lain dibawahnya.

4.7 Data Infrastruktur Pendukung e-Government

Data infrastruktur dibawah ini diperoleh dari warta ekonomi selaku penyelenggara e-Government Awards pada tahun 2004. Data ini sekaligus menunjukkan kapasitas dan perkembangan e-Government di Indonesia.

- 67,5% website pemerintah daerah dikembangkan oleh pengawainya sendiri.
- Dari sistem koneksi internet yang dipakai 35% menggunakan standard modem, 33,33% menggunakan Leassed Line, sisanya menggunakan cable modem, ASDL dan lainnya.
- Dari merk server yang dipakai 29,17% menggunakan compaq, 23,33% menggunakan IBM, 15,83% menggunakan HP, dan sisanya menggunakan Dell, Sun Microsystems dan rakitan.
- Dari lokasi penempatan website 41,67% server berada di kantor yang terkoneksi langsung ke internet, 27,50% melalui virtual hosting, 24,16% Co-Location.
- Dari sistem operasi yang digunakan 60% menggunakan Windows NT/2000/2003, 36,67% menggunakan Linux, 7,50% menggunakan FreeBSD/NetBSD/OpenBSD, 2,50% menggunakan Novell, dan Sun Solaris 1,67%.
- Dari sistem database yang dipakai 40% menggunakan MS SQL, 35,50% menggunakan MySQL, dan sisanya menggunakan Infomix, DB2, Sybase, Oracle, PostgresSQL.

5 Penutup

Dari bahasan diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa membangun e-Government dalam dunia nyata, tetap harus mengacu pada pengertian, visi, dan elemen sukses dari e-Government itu sendiri, sesuai dengan

strategi pemerintah dalam meningkatkan sistem pelayanan kepada masyarakat. Pengembangan e-Government di Indonesia masih jauh dari standar pengembangan yang telah penulis kaji dalam makalah ini. Kekurangan ini terlihat dengan kurangnya dukungan dari segi sumber daya manusia yang masih rendah, ketersediaan infrastruktur yang kurang memadai. Dari kedua faktor dipengaruhi oleh rendahnya dukungan dari pemimpin dan pejabat pemerintah dalam mengalokasikan dana untuk pengembangan e-Government.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Rakhmat. (2002), "**Kajian Pengembangan e-Government di Indonesia : Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Kutai Timur**". Diakses dari <http://digilib.itb.ac.id/go.php?id=jbptitbpp-gdl-s2-2002-rakhmat-1719-e-goverme>, pada tanggal 10 November 2006.
- Anonim, "**Unisys in E-Government: Services and Solution for State and Local Agencies**". Diakses dari <http://www.unisys.com/publicsector> pada tanggal 5 Januari 2007.
- Indrajit, Richardus Eko. (2002) "**Electronic Government, Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital**", ANDI, Yogyakarta.
- Indrajit, Richardus Eko. (2005) "**e-Government In Action, Ragam Kasus Implementasi Sukses Di Berbagai Belahan Dunia**", ANDI, Yogyakarta.
- Nurchahyo, Bambang. (2004) "**Elemen-elemen e-Government**", Pusat Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Raharjo, Budi. (2001), "**Membangun e-Government**". Diakses dari <http://www.cert.or.id/~budi/articles/e-gov-makassar.doc>, pada tanggal 26 November 2007.
- Setiawati, Wenny. (2004), "**PENERAPAN e-Government DI INDONESIA**". Diakses dari http://www.lkht.net/artikel_pertopik.php?subtema=e-Government, pada tanggal 10 November 2006.

- Soenjojo, Hadwi. (2004), "**KUNJUNGAN SITUS WEB PEMERINTAH DAERAH**". Diakses dari http://www.kenarok.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=9, pada tanggal 10 November 2006.
- Soenjojo, Hadwi. (2005), "**Implementasi e-Government Sejumlah Pemerintah Daerah**". Diakses dari <http://www.depkominfo.go.id/download/EgovPemda.pdf>, pada tanggal 26 November 2006.
- SAP Corp, "**mySap.com Public Sector - Executive Sumarry**". Diakses dari <http://sap.com>, pada tanggal 5 Januari 2007.
- SAP Corp, "**mySap.com Public Sector - e-Government White Papers**". Diakses dari <http://sap.com>, pada tanggal 5 Januari 2007.
- Tim PPTI. Pembekalan Materi Telematika Sistem Informasi Nasional dan e-Government. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2003.
- Tim Survei e-Government Warta Ekonomi. (2004), "**Data Insfrastruktur**". Diakses dari <http://www.wartaekonomi.com/egov/infrastruktur.asp>, pada tanggal 26 November 2006.
- UNDP. "**E-Government: Consideration for Arab States**". UNDP, 2001
- World Bank, "**A Definition of e-Government**". Diakses dari <http://www1.worldbank.org/publicsector/egov/definition.htm>, pada tanggal 5 Januari 2007.

KARAKTERISTIK E-GOVERNMENT DI INDONESIA

Bambang Sugiarto (03 523 018)

*Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia
E-mail: the_babbra@yahoo.com*

ABSTRAKS

Isu electronic government di Indonesia saat ini tengah marak. Berbagai pihak baik pemerintah, swasta, pendidikan tinggi, dan lain sebagainya mencoba untuk memberikan kontribusi dalam pengembangannya. Banyak persoalan yang muncul untuk mewujudkannya baik dari sisi teknis maupun non teknis. Untuk itu perlu dilakukan kajian electronic government terlebih dahulu untuk melihat apa dan bagaimana kondisi electronic government di Indonesia dari aspek teknis dan non teknis. Hal ini penting mengingat banyaknya kasus kegagalan yang terjadi terhadap penerapan electronic government di Indonesia.

Kata kunci :electronic government di Indonesia, kajian electronic government, penerapan electronic government.

1. PENDAHULUAN

Indonesia tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental, dari sistem pemerintahan yang otoriter dan sentralistik menuju ke sistem pemerintahan yang demokratis, dan menerapkan perimbangan kewenangan pusat dan daerah otonom. Perubahan yang tengah terjadi tersebut menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.

Perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara serta pembangunan berkelanjutan, sukar untuk dapat dilaksanakan tanpa diimbangi dengan pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, yang secara nyata mampu membawa perubahan dan pembaharuan pada kehidupan bangsa. Kecenderungan adanya perubahan tersebut perlu direspon tidak hanya oleh pemerintah di tingkat pusat saja, melainkan juga di tingkat pemerintahan daerah.

Pemerintah harus mengupayakan kelancaran komunikasi antar lembaga-lembaga tinggi negara, pemerintah pusat/daerah, serta masyarakat luas, agar terjamin suatu sistem penyelenggaraan bernegara yang lebih efektif, efisien, serta menumbuhkan peningkatan kepercayaan masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informasi berupaya terus melakukan pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan mengambil langkah strategis, salah satu diantaranya adalah membentuk *Task Force* Pengembangan e-Government Nasional.

Inisiatif instansi pemerintah pusat dan daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) terhadap pengembangan e-Government patut disambut gembira. Sampai dengan bulan Juni 2003 tercatat 353 situs web yang telah dibangun untuk dimanfaatkan antara lain sebagai media penyampaian profil instansi, berita dan informasi yang berhubungan dengan instansi bersangkutan, sumberdaya daerah, layanan masyarakat. Sebagian diantaranya telah menyediakan layanan interaktif yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan dunia usaha.

Atas kerja keras dan prakasa *Task Force* Pengembangan e-Government, pada tanggal 9 Juni 2003 telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Inpres Nomor 3 tahun 2003 tersebut perlu ditindak lanjuti dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang lebih detil untuk mendukung implementasi di lapangan yang saat ini tengah disiapkan.

Situs web pemerintah daerah merupakan salah satu strategi didalam melaksanakan pengembangan e-government secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur. Pembuatan situs web pemerintah daerah merupakan tingkat pertama dalam pengembangan e-Government di Indonesia dengan sasaran agar masyarakat Indonesia dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi dan layanan pemerintah daerah, serta ikut berpartisipasi di dalam pengembangan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan media internet.

2. TUJUAN

Penelitian yang dilakukan terkait dengan karakteristik *e-Government* di Indonesia, bertujuan antara lain untuk melakukan kajian tentang penerapan dan kondisi *e-Government* di Indonesia dengan studi kasus pengembangan *e-Government* di kotamadya Yogyakarta.

3. LANDASAN TEORI

3.1 Jenis-jenis pelayanan *e-Government*

Dalam implementasinya, dapat dilihat sedemikian beragam tipe pelayanan yang ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakatnya melalui *e-Government*. Salah satu cara mengkategorikan jenis-jenis pelayanan tersebut adalah dengan melihatnya dari dua aspek utama¹:

- Aspek kompleksitas, yaitu yang menyangkut seberapa rumit anatomi sebuah aplikasi *e-Government* yang ingin dibangun dan diterapkan.
- Aspek manfaat, yaitu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan besarnya manfaat yang dirasakan oleh para penggunanya.

Berdasarkan dua aspek diatas, maka jenis-jenis proyek *e-Government* dapat dibagi menjadi tiga kelas utama, yaitu²:

- *Publish*. Jenis ini merupakan implementasi *e-Government* yang termudah karena selain proyeknya berskala kecil, kebanyakan aplikasinya tidak perlu melibatkan sejumlah sumber daya yang besar dan beragam. Dalam kelas *publish* ini yang terjadi adalah sebuah komunikasi satu arah, dimana pemerintah mempublikasikan berbagai data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas diakses oleh

¹ Richardus Eko Indrajit, **Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital**, ANDI, 2002, hlm. 29.

² Richardus Eko Indrajit, **Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital**, ANDI, 2002, hlm. 29-34.

masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui internet.

Contoh

- Masyarakat dapat melihat dan *download* berbagai undang-undang maupun peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah.
- Para pengusaha dapat mengetahui syarat-syarat mendirikan sebuah perusahaan seperti yang diatur dalam undang-undang dan bagaimana prosedur pendirian yang harus dilaksanakan.
- Ibu-ibu dapat memperoleh informasi mengenai cara hidup sehat dari Departemen Kesehatan.
- Peneliti dapat mengakses berbagai data statistik hasil pengkajian berbagai lembaga pemerintahan untuk dipergunakan sebagai data sekunder.
- Rakyat secara online dan *real time* dapat mengetahui hasil sementara pemilihan umum melalui situs yang dimiliki KPU (Komisi Pemilihan Umum).
- *Interact*. Pada kelas *interact* ini bersifat aktif, yaitu terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan mereka yang berkepentingan. Ada dua jenis aplikasi yang biasa digunakan. Yang pertama adalah bentuk portal dimana situs terkait memberikan fasilitas *searching* bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi yang spesifik (pada kelas *publish user* hanya dapat mengikuti *link* saja). Yang kedua adalah pemerintah menyediakan kanal dimana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan baik secara langsung (seperti *chatting*, *tele-conference*, *web-TV*) maupun tidak langsung (melalui *email*, *frequent ask question*, *newsletter*, *mailing list*).
 - Rakyat dapat berdiskusi langsung dengan wakil rakyat melalui *e-mail* maupun *mailing list*.
 - Perusahaan-perusahaan swasta dapat melakukan tanya jawab mengenai persyaratan tender untuk berbagai proyek yang direncanakan oleh pemerintah.

- Departemen-departemen di pemerintahan dapat melakukan wawancara melalui *chatting* atau *e-mail* dalam proses perekrutan calon-calon pegawai negeri baru.
- *Transact*. Yang terjadi pada kelas ini adalah interaksi seperti pada kelas *interact*, hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya (tidak gratis, masyarakat harus membayar jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau mitra kerjanya). Aplikasi ini jauh lebih rumit dibandingkan dengan kedua kelas lainnya karena harus adanya sistem keamanan yang baik agar perpindahan uang dapat dilakukan secara aman dan hak-hak *privacy* berbagai pihak yang bertransaksi terlindungi dengan baik.
 - Masyarakat dapat mengurus permohonan memperoleh KTP (Kartu Tanda Penduduk) baru atau memperpanjangnya melalui internet.
 - Para wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak individu atau perusahaan secara *online* melalui internet.
 - Melalui aplikasi *e-Procurement*, rangkaian proses tender proyek-proyek pemerintah dapat dilakukan secara online melalui internet.
 - Para praktisi bisnis dapat membeli sejumlah hasil riset yang relevan dengan kebutuhannya yang ditawarkan dan dijual oleh Badan Pusat Statistik melalui internet (*download*).

3.2 Organisasi manajemen situs web pemerintahan

Pada suatu organisasi kecil yang masih menggunakan aturan *webmaster* tradisional, mungkin hanya diperlukan satu orang sebagai penanggungjawab untuk menangani persoalan strategik dan implementasi praktis situs web pemerintah daerah. Hal tersebut sudah harus diubah cara penanganannya. Adanya kompleksitas pada publikasi secara elektronik melalui media *online*, dan bertambahnya kepentingan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk memberikan informasi kepada masyarakat, maka diperlukan adanya

persyaratan standar struktur organisasi yang akan menjadi pegangan bagi penanggungjawab situs web pemerintah daerah di dalam melakukan pengawasan dan pemantauan. Adapun organisasi manajemen situs web pemerintah daerah sebaiknya terdiri atas³ :

- Pelindung (Gubernur/Bupati/Walikota)
- Penanggungjawab Situs Web Pemerintah Daerah (eselon tertinggi pada organisasi struktural Pemerintahan Daerah)
- Manajer Situs (eselon satu tingkat dibawah eselon tertinggi pada organisasi struktural Pemerintahan Daerah)
- Tim Pengelola (sejumlah pegawai Pemerintah Daerah yang mampu, serta mempunyai standar kompetensi di bidang teknologi informasi). Melakukan tugas operasional situs web, pemantauan dan pemeliharaan standar-standar situs web, terutama tanggungjawab pemasukan informasi yang tersebar luas di dalam organisasi pemerintah daerah.
- Tim Asistensi (para eselon satu tingkat dibawah eselon tertinggi pada organisasi struktural pemerintah daerah, mewakili unit-unit kedinasan yang ada di daerah)

Struktur organisasi, ukuran, dan jumlah tim yang terlibat pada suatu pengelolaan situs web pemerintah daerah akan bervariasi tergantung pada kebutuhan organisasinya.

Seorang Manajer Situs bertanggung jawab atas manajemen secara keseluruhan dari situs-situs web pemerintah daerah yang bersama-sama membentuk sajian secara *online* dari organisasi pemerintahan. Mereka hendaknya bekerja sama dengan bagian-bagian lain dari organisasi pemerintahan untuk memastikan adanya keterpaduan proses-proses *online*. Diperlukan sebuah tim yang melakukan pemantauan pemeliharaan standar-standar situs web pemerintah daerah, terutama tanggungjawab pemasukan informasi yang tersebar luas di dalam organisasi pemerintahan.

³ Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, **Panduan Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah**. hlm. 24

3.3 Strategi pengembangan e-Government

Strategi-strategi yang perlu dilakukan dalam pengembangan dan pengembangan situs web pemerintah daerah antara lain⁴ :

- Identifikasi pengunjung dan non pengunjung situs web, jika dimungkinkan dapat dilakukan melalui riset atau dialog dengan kelompok pengunjung.
- Identifikasi keinginan sejumlah pengunjung situs web untuk dapat memenuhi kebutuhannya pada situs web pemerintah daerah yang dibuat.
- Memberi pemahaman dan respon yang memuaskan kepada pengunjung situs web (baik melalui penilaian umpan balik maupun riset penggunaan situs web).
- Penyediaan sumberdaya manusia, khususnya untuk pelaksana dengan keterampilan dan kemampuan sesuai standar kompetensi untuk tim situs web.
- Keterpaduan situs web dengan proses bisnis yang berhubungan publikasi elektronik dan publik, seperti cara pengunjung mengakses situs web, publikasi informasi yang disampaikan, masalah manajemen yang berhubungan dengan penyimpanan, informasi, dokumen, pengetahuan, serta cara rekrutmen dan konsultasi.
- Keterpaduan situs web kedalam strategi organisasi untuk melaksanakan pemerintahan yang terbuka dan kemudahan memperoleh informasi.
- Pemantauan pengembangan situs web dan keberhasilannya sebagai alat untuk memenuhi tujuan-tujuan organisasi pemerintahan.
- Perancangan strategi *online* untuk masa depan organisasi termasuk kebutuhan bisnis.
- Identifikasi posisi situs web di dalam strategi organisasi secara keseluruhan termasuk strategi komunikasi.

⁴ Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, **Panduan Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah**. hlm. 25-27

- Keterpaduan antara situs web internet dengan organisasi intranet yang ada di kantor pemerintah daerah serta sistem lainnya.

3.4 Pengaplikasian alat ukur *Balanced-Scorecard* pada e-Government

Dalam e-Government Booz Allen dan Hamilton dalam studinya bersama Barstelmnt Founndation mengenalkan *balanced e-Government scorecard* sebagai alat ukur tingkat keberhasilan pemerintahan yang menerepkan e-Government. Terdapat lima dimensi dalam *balanced e-Government scorecard* yaitu⁵:

- Manfaat. Dimensi manfaat berhubungan dengan kualitas dan kuantitas layanan yang diberikan dan cara masyarakat dalam mendapatkan manfaat dan layanan tersebut.
- Efisiensi. Dimensi efisiensi berhubungan dengan bagaimana teknologi bisa mempercepat proses dan meningkatkan kualitas layanan.
- Partisipasi. Dimensi ini berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam kesempatan penyampaian pendapat dan proses pengambilan keputusan. Masyarakat dengan demikian dapat berkomunikasi dan berkonsultasi langsung dengan wakil-wakilnya di legislatif.
- Transparansi. Dimensi ini terkait dengan keterbukaan informasi menuju proses transparansi pemerintahan. Kebutuhan masyarakat akan informasi yang semakin terbuka menjadi semakin terasa.
- Manajemen perubahan. Dimensi ini terkait dengan proses implementasi dengan proses *review* yang jelas dan dikelola dengan baik. Dengan perencanaan strategis dan strategi pengembangan ke depan yang baik, e-Government dapat berkembang secara dinamis melalui proses monitoring dan kontrol yang ketat.

⁵ Richardus Eko Indrajit, **e-Government In Action: Ragam Kasus Implementasi Sukses Di Berbagai Belahan Dunia**, ANDI, 2002, hlm.43-47

4. IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA SITUS WEB PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

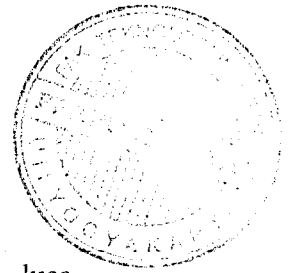
Merujuk pada Instruksi Presiden no 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government pemerintah kota Yogya membangun situs web pemerintah yang beralamat di www.Jogja.go.id sebagai salah satu langkah dalam mengimplementasikan e-Government di wilayah kotamadya Yogya.

4.1 Layanan informasi jogja.go.id

Layanan informasi yang terdapat dalam www.jogja.go.id dapat diakses dalam bentuk link-link yang tersusun dalam beberapa *main menu* yang didalamnya terdapat beberapa *menu item*. Berikut adalah layanan-layanan informasi yang terdapat dalam www.Jogja.go.id :

- Fasilitas kota. Pada menu ini masyarakat dapat memperoleh informasi tentang alamat berbagai fasilitas kota. Fasilitas kota yang dimaksud adalah sebagai berikut :
 - Telepon penting. Terdapat informasi nomor-nomor telepon penting, antara lain : pemadam kebakaran, rumah sakit, taksi, polsekta, PLN, PDAM, PMI, Telkom.
 - Hotel. Terdapat informasi hotel di DIY, informasi yang bisa diperoleh antara lain : nama hotel, alamat, telepon, tarif, website, faximile, email.
 - Hotel melati. Pada saat papper ini dibuat, data pada link ini masih kosong.
 - Pondok wisata. Pada saat papper ini dibuat, data pada link ini masih kosong.
 - Agen wisata. Pada saat papper ini dibuat, data pada link ini masih kosong.
 - ATM. Terdapat informasi lokasi ATM semua bank yang ada di Jogja.
 - Bank. Terdapat informasi lokasi, telepon dan faximile semua bank yang ada di Jogja.

- Money Changer. Terdapat informasi lokasi dan telepon money changer yang ada di kota Jogja.
- Klinik 24 jam. Terdapat informasi lokasi dan telepon klinik 24 jam yang ada di kota Jogja. Kekurangan dari informasi yang diberikan adalah informasi mengenai alamat dari klinik 24 jam yang kurang lengkap.
- Dokter jaga. Pada saat papper ini dibuat, data pada link ini masih kosong.
- Super Market. Terdapat informasi lokasi, telepon dan faximile supermarket yang ada di kota Jogja.
- Wartel. Terdapat informasi lokasi, telepon dan faximile wartel yang ada di kota Jogja.
- Rumah Makan. Terdapat informasi nama dan lokasi rumah makan yang ada di kota Jogja.
- Terminal. Pada saat papper ini dibuat, data pada link ini masih kosong.
- Apotek. Terdapat informasi lokasi dan telepon apotek yang ada di kota Jogja.
- Perpustakaan. Terdapat informasi lokasi dan telepon perpustakaan dan taman bacaan di kota Jogja.
- Panti. Berisi data nama panti, alamat, daya tampung serta keterangan panti sosial yang ada di kota Jogja.
- Jogja ku. Pada menu ini masyarakat dapat memperoleh informasi tentang profil dari kota Jogja. Kategori informasi yang ada adalah :
 - Sejarah kota. Berisi sejarah berdirinya kota Jogja dari bentuk kerajaan sampai pada bagian negara kesatuan RI.
 - Sejarah pemerintah kota. Pada saat papper ini dibuat, data pada link ini masih kosong.
 - Visi dan misi. Berisi informasi mengenai visi dan misi kota Jogja.



- Geografis. Berisi informasi batas wilayah, keadaan alam, luas wilayah, tipe tanah, iklim dan demografi kota Jogja.
- Peta. Terdapat gambar kota Jogja yang dapat diperbesar dan difokus sesuai keinginan *user*.
- Angka kota Jogja. Berisi data-data laporan pendapatan per-kapita dari berbagai sektor usaha dari tahun 1999-2002.
- Kependudukan. Berisi data-data kependudukan kota Jogja berdasarkan kecamatan yang ada.
- Lambang. Berisi gambar lambang kota Jogja, dasar hukum dan makna dari lambang tersebut.
- Identitas. Terdapat informasi mengenai flora dan fauna yang di identikan dengan suasana kota Jogja.
- Info kota. Pada menu ini terdapat informasi tentang beberapa potensi daerah yang dimiliki oleh kota Jogja. Potensi yang dimaksud adalah :
 - Bursa agro Jogja. Berisi informasi dari dinas pertanian dan kehewananan kota Yogyakarta.
 - Pendidikan. Pada link ini user diarahkan kedalam website dinas pendidikan dan pengajaran kota Yogyakarta yang beralamat di www.pendidikan.Jogja.go.id.
 - Ekonomi. Berisi informasi perekonomian di kota Jogja antara lain informasi tentang harga bahan pokok, informasi daftar perusahaan dan sentra industri, peta sentra industri, informasi kelengkapan pengajuan kredit lunak.
 - Pariwisata. Pada link ini user diarahkan kedalam website dinas pariwisata yang beralamat di www.pariwisata.Jogja.go.id.
 - Tenaga kerja. Pada link ini user diarahkan kedalam website dinas tenaga kerja dan transmigrasi yang beralamat di www.nakertrans.Jogja.go.id.
 - Transportasi. Berisi informasi jadwal penerbangan, jadwal kereta api, dan informasi pemesanan taksi.

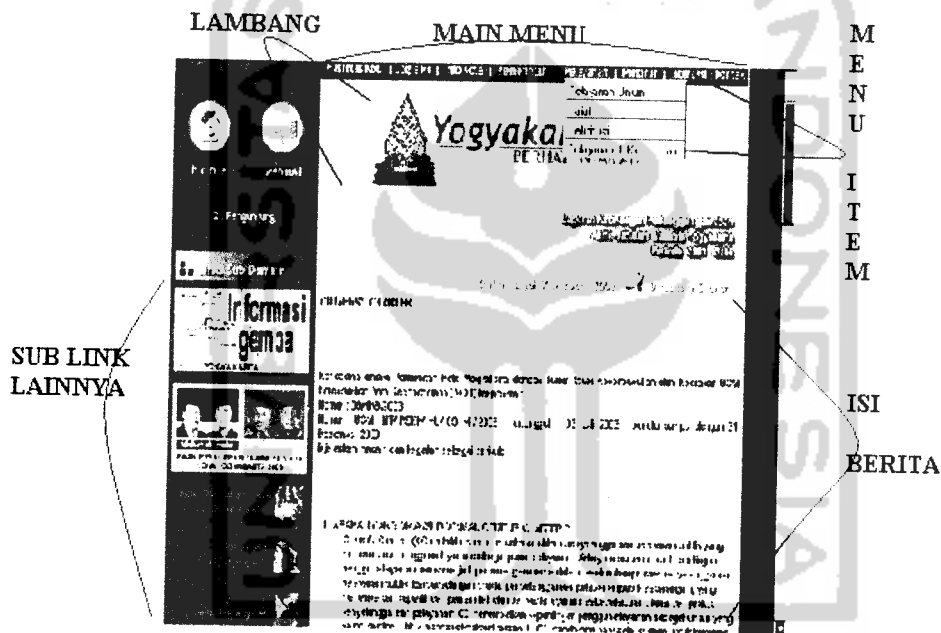
- Permasalahan kota. Pada link ini user diarahkan kedalam website unit pelayanan informasi dan keluhan pemerintah kota Yogyakarta yang beralamat di www.upik.Jogja.go.id.
- Pemerintah. Pada menu ini merupakan upaya pemerintah kota Jogja dalam menyelenggarakan transparansi pemerintahan. Sub menu dalam menu pemerintah adalah :
 - Profil walikota. Berisi mengenai informasi dari biodata walikota Yogyakarta.
 - Agenda walikota. Berisi informasi lokasi dan waktu kegiatan walikota.
 - Agenda wakil walikota. Berisi informasi lokasi dan waktu kegiatan wakil walikota.
 - Aparat pemkot. Berisi informasi layanan yang diberikan pada tiap instansi pemerintah kota Yogyakarta.
 - Keuangan. Berisi laporan anggaran belanja daerah dan neraca keuangan pemerintah kota Yogyakarta.
 - Pengumuman kegiatan. Berisi pengumuman kegiatan di lingkungan pemerintah kota Yogyakarta yang pelaksanaannya dikerjakan oleh penyedia barang dan jasa.
 - Kerjasama. Berisi daftar perusahaan, instansi baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bekerjasama dengan pemerintah kota Yogyakarta
 - Daftar e-mail. Berisi informasi daftar e-mail pejabat dan instansi-instansi pemerintah kota Yogyakarta.
- Pelayanan. Pada menu ini terdapat tipe layanan yang diberikan pemerintah kota Jogja kepada masyarakat berikut daftar harga untuk keperluan administrasi pelayanan tersebut. Sub menu dari menu pelayanan adalah :

- Pelayanan umum. Berisi informasi pelayanan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah kota Yogyakarta berikut cara dan prosedur dalam mendapatkan pelayanan tersebut.
- Pajak. Berisi daftar informasi pajak yang harus dibayarkan masyarakat kepada pemerintah kota Yogyakarta.
- Retribusi. Berisi informasi tentang jenis-jenis retribusi yang ada dan harus dibayarkan ketika masyarakat kepada pemerintah ketika fasilitas yang disediakan pemerintah kota Yogyakarta.
- Pelayanan di kecamatan. Berisi informasi pelayanan di kecamatan. Pelayanan yang ada antara lain : pembuatan dan perpanjangan KTP, penerbitan kartu keluarga, pemberian ijin IMBB, pembuatan kartu identitas sementara, ijin penutupan jalan tertentu.
- Perizinan. Pada saat papper ini dibuat, data pada link ini masih kosong.
- Interaksi. Pada menu ini masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam menyampaikan kritik dan pendapat kepada pemerintah kota. Untuk mendukung layanan ini terdapat beberapa sub menu yaitu:
 - Album kota. Pada saat papper ini dibuat, data pada link ini masih kosong.
 - Jogja e-card. Untuk mengirim kartu ucapan kepada e-mail pengunjung jogja.go.id.
 - Link Jogja. Sejenis layanan *search engine* untuk pencarian data pada jogja.go.id.
 - Ide warga. Berisi kritikan dan usulan warga untuk kenyamanan kota Yogyakarta.
 - Keluhan warga. Berisi formulir pemasukan data keluhan warga yang akan ditangani oleh unit pelayanan informasi dan keluhan pemerintah kota Yogyakarta.
 - Pokok dan tokoh. Berisi ide-ide dari tokoh-tokoh kota Yogyakarta untuk pembangunan daerah.

- o Buku tamu. Merupakan upaya pengelola website untuk mendapatkan kritikan, usulan dan pujian dari pengunjung jogja.go.id.
- Kontak. Berisi informasi alamat, telepon, faximile, website dan e-mail pejabat pemerintah kota Yogyakarta.

4.2 Analisa website www.jogja.go.id

Pembuatan antarmuka (*interface*) dari situs web pemerintah kota Yogyakarta yang beralamat di www.jogja.go.id telah dirancang dan didesain untuk menggambarkan situasi dan nuansa dari keadaan kota Yogyakarta.



Gambar 4.1 Tampilan www.jogja.go.id

Dari gambar diatas terlihat penggunaan warna kombinasi hijau tua dan hijau muda yang memberi kesan nyaman, hal ini sesuai dengan kata “berhati nyaman” yang identik dengan kota Yogyakarta.

Sisi negatif dari pembuatan jogja.go.id adalah halaman-halaman yang dibuat terlalu banyak animasi sehingga mempengaruhi kecepatan akses, dan pembuatan tiap halamannya tidak menggunakan frame sehingga masih terdapat

ketidakteraturan pada beberapa halaman dan akan menjadi tidak efisien ketika harus memperbaiki tiap halamannya.

4.3 Perbandingan e-Government di Kodya Yogyakarta, Kebumen, Palembang

Sebagai bahan perbandingan dalam penerapan e-Government di Indonesia penulis membandingkan penerapan e-Government pada 3 daerah tingkat II yaitu Kodya Yogyakarta, Kebumen, dan Palembang. Tabel-tabel berikut adalah data-data spesifikasi dari ketiga daerah tersebut :

Tabel 1. Spesifikasi e-Government di Kodya Yogyakarta, Kebumen, Palembang

Spesifikasi	Kodya Yogyakarta	Kebumen	Palembang
Alamat situs web	www.jogja.go.id	www.kebumen.go.id	www.palembang.go.id
Bahasa	Indonesia, Inggris	Indonesia, Inggris	Indonesia
Bahasa Pemrograman web yang digunakan	ASP	PHP	PHP

Tabel 2. Layanan level *publish* di Kodya Yogyakarta, Kebumen, Palembang

Layanan	Kodya Yogyakarta	Kebumen	Palembang
<i>Pooling</i>	Ada	Ada	Ada
<i>GuestBook</i>	Ada	Ada	Ada
Profil kota	Ada	Ada	Ada
Berita	Ada	Ada	Ada
Informasi potensi daerah	Ada	Ada	Ada
<i>Download</i> peraturan daerah	Ada	Ada	Ada

Tabel 3. Layanan level *interact* di Kodya Yogyakarta, Kebumen, Palembang

Layanan	Kodya Yogyakarta	Kebumen	Palembang
<i>Webmail</i>	Ada	Ada	Ada
Pemasangan iklan	Ada	Ada	Tidak ada
Forum	Ada	Ada	Ada
Akses informasi via sms	Tidak ada	Tidak Ada	Ada

Tabel 4. Layanan level *transact* di Kodya Yogyakarta, Kebumen, Palembang

	Kodya Yogyakarta	Kebumen	Palembang
Layanan	- Pembuatan Kartu Kuning (Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi)	-Pemasukan data pegawai negeri sipil secara online melalui tiap instansi yang bersangkutan	-Tidak ada

Dari ketiga daerah tersebut, Kodya Yogyakarta dan Kebumen sudah mencapai pada tingkat layanan *transact*, sedangkan Palembang berada pada tingkat layanan *interact*. Hal ini dikarenakan pada kabupaten Kebumen sudah adanya standarisasi basis data dalam sistem pendataan pegawai pada setiap instansi, dimana setiap instansi pemerintah dapat meng-*upload* data pegawainya secara langsung melalui situs *web* pemerintah Kebumen yang beralamat di www.kebumen.go.id. Pada pemerintah Kodya Yogyakarta, tingkat layanan yang diberikan sampai tahap *transact*, hal ini dikarenakan adanya pembuatan kartu kuning secara online yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi kepada para pencari kerja dan untuk layanan ini membutuhkan tingkat keamanan dalam hal validasi yang tinggi. Sebagai catatan, saat makalah ini ditulis pemerintah Kodya Yogyakarta sedang mengembangkan *e-Procurement* dimana rangkaian proses tender proyek-proyek pemerintah dapat dilakukan secara *online* melalui internet. Layanan *e-Procurement* ini akan membawa penerapan *e-Government* pemerintah Kodya Yogyakarta pada tingkat layanan *transact*, hal ini dikarenakan data yang dimasukkan oleh pihak *developer* proyek akan melalui proses validasi yang berada pada situs web pemerintah Kodya Yogyakarta. Penerapan *e-Government* pada pemerintah kabupaten Palembang pada level *interact*, hal ini dikarenakan tidak adanya layanan yang membutuhkan validasi tingkat keamanan yang tinggi pada layanan-layanan yang diberikan melalui alamat situs *web*nya yang beralamat di www.palembang.go.id. Dari perbandingan *e-Government* pada ketiga daerah tingkat II diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan *e-Government* di Indonesia telah menunjukkan kemajuan untuk paling tidak mendekati standar penerapan *e-Government* yang banyak diterapkan di negara-negara maju.

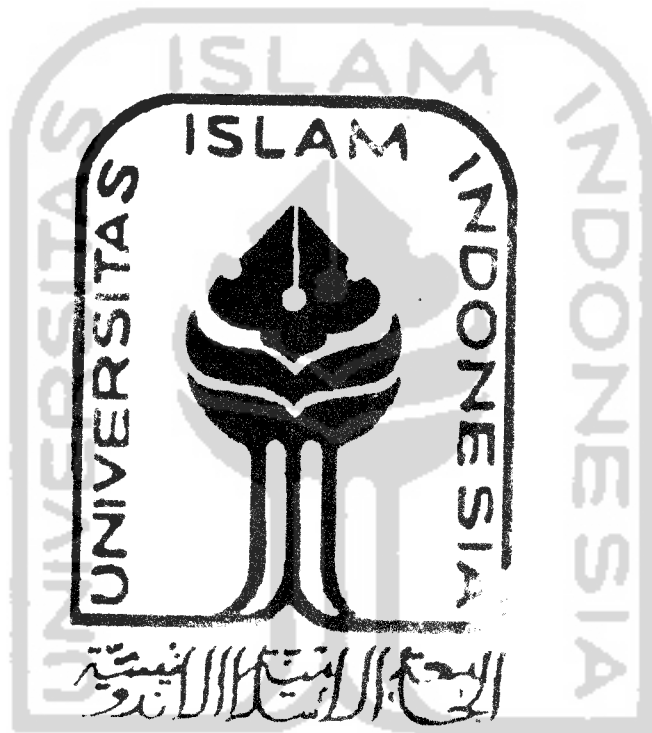
5. PENUTUP

Dari bahasan diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penerapan e-Government di Indonesia umumnya adalah dalam bentuk sebuah situs web pemerintahan yang berisi informasi layanan dan potensi daerah. Dengan melalui situs web, masyarakat dapat mengetahui layanan-layanan yang diberikan pemerintah, mengetahui informasi tentang fasilitas-fasilitas kota, serta transparansi dan proses demokrasi yang dapat dijalankan melalui dunia maya. Pada situs web pemerintahan kota Yogyakarta hampir semua aspek layanan e-Government telah dapat terealisasi dalam situs web tersebut. Dan dari hasil perbandingan penerapan e-Government di Kodya Yogyakarta, Kebumen, dan Palembang telah menunjukkan kemajuan penerapan e-Government di daerah tingkat II untuk meningkatkan mutu sistem pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Rakhmat. (2002), "**Kajian Pengembangan e-Government di Indonesia : Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Kutai Timur**". Diakses dari <http://digilib.itb.ac.id/go.php?id=jbptitbpp-gdl-s2-2002-rakhmat-1719-e-goverme>, pada tanggal 10 November 2006
- Indrajit, Richardus Eko. (2002) "**Electronic Government, Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital**", ANDI, Yogyakarta.
- Indrajit, Richardus Eko. (2005) "**e-Government In Action, Ragam Kasus Implementasi Sukses Di Berbagai Belahan Dunia**", ANDI, Yogyakarta.
- Nurchayyo, Bambang. (2004) "**Elemen-elemen e-Government**", Pusat Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Raharjo, Budi. (2001), "**Membangun e-Government**". Diakses dari <http://www.cert.or.id/~budi/articles/e-gov-makassar.doc>, pada tanggal 26 November 2007.

- Setiawati, Wenny. (2004), "**PENERAPAN e-GOVERNMENT DI INDONESIA**". Diakses dari http://www.lkht.net/artikel_pertopik.php?subtema=e-government, pada tanggal 10 November 2006.
- Soenjojo, Hadwi. (2004), "**KUNJUNGAN SITUS WEB PEMERINTAH DAERAH**". Diakses dari http://www.kenarok.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=9, pada tanggal 10 November 2006.
- Soenjojo, Hadwi. (2005), "**Implementasi e-Government Sejumlah Pemerintah Daerah**". Diakses dari <http://www.depkominfo.go.id/download/EgovPemda.pdf>, pada 26 November 2006.
- Tim PPTI. Pembekalan Materi Telematika Sistem Informasi Nasional dan e-Government. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2003.
- Tim Survei e-Government Warta Ekonomi. (2004), "**Data Insfrastruktur**". Diakses dari <http://www.wartaekonomi.com/egov/infrastruktur.asp>, pada 26 November 2006.
- Kementerian Komunikasi dan Informasi RI. (2004), "**Panduan Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah**". Diakses dari www.depkominfo.go.id/download/Bab2Panduan.doc, pada 26 November 2006.
- Kementerian Komunikasi dan Informasi RI. (2005), "**PENERAPAN E-GOVERNMENT DAN BERBAGAI KENDALA DI PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**". Diakses dari www.depkominfo.go.id/download/IT-DIYogya.pdf, pada 26 November 2006.
- Kantor Arsip dan Pengolahan Data Elektronik Yogyakarta. (2002), "**Laporan Rencana Stratejik Instansi Kantor Arsip dan Pengolahan Data Elektronik tahun 2002**". Diakses dari www.jogja.go.id/kantor/renstrain.doc, pada 26 November 2006.



جامعة الإسلام في اندونيسيا

Tugas Akhir Non Skripsi

PERANCANGAN APLIKASI E-GOVERNMENT

Bambang Sugiarto (03 523 018)

*Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia
E-mail: the_babbra@yahoo.com*

ABSTRAKS

Situs web pemerintah daerah merupakan salah satu strategi didalam melaksanakan pengembangan e-government secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur. Pembuatan situs web pemerintah daerah merupakan tingkat pertama dalam pengembangan e-Government di Indonesia dengan sasaran agar masyarakat Indonesia dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi dan layanan pemerintah daerah, serta ikut berpartisipasi di dalam pengembangan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan media internet.

Kata kunci:: situs web pemerintah, pengembangan e-government, layanan pemerintah.

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan teknologi di bidang sistem informasi, penyajian informasi di bidang pemerintahan telah dapat dilakukan secara elektronik. Saat ini telah beragam aplikasi diterapkan guna mengolah setiap data yang berkaitan dengan masalah pemerintahan sehingga menjadi informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan. Penerapan aplikasi dilakukan pada tingkat pusat dan daerah dengan beragam bidang dan wewenang. Namun pengembangan aplikasi dibidang pemerintahan dilakukan secara sporadis dan dilakukan dalam masing-masing lingkup bidang pemerintahan, hal ini membawa akibat terbentuknya sistem-sistem yang berdiri secara sendiri-sendiri. Konstelasi sistem yang terbentuk secara sporadis tersebut, secara maya telah membentuk suatu kepulauan sistem informasi yang terpisah-pisah dan berdiri sendiri. Dimana masing-masing pulau sistem memiliki struktur data, bisnis proses

dan teknologi yang berbeda diantara satu dengan lainnya. Hal ini membawa dampak tidak terintegrasinya sistem informasi pemerintahan dan mengakibatkan terjadinya duplikasi dan redudansi data. Berakibat juga kepada tidak efektif dan efisiennya sistem informasi yang dimiliki oleh pemerintah dan akan membawa akibat kepada berkurangnya efektifitas informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dan tentunya akan mengurangi manfaat yang dibutuhkan dalam rangka pengambilan keputusan.

Dengan terbentuknya konfigurasi sistem informasi yang tidak berada dalam satu konteks sistem informasi terintegrasi mengakibatkan terputusnya mata rantai pengelolaan data dan informasi dalam arus informasi pemerintahan sehingga mengakibatkan informasi yang dihasilkan tidak sebagaimana yang diharapkan.

Kesemua hal tersebut terjadi sebagai akibat belum adanya suatu acuan pengembangan (*guidelines*) yang bersifat komprehensif dan mencakup integrasi serta interaksi seluruh sistem yang dibutuhkan oleh pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah. Acuan pengembangan tersebut dibutuhkan oleh seluruh instansi maupun lembaga pemerintah ditingkat pusat dan daerah untuk dapat membangun rancang bangun cetak biru sistem informasi yang dapat berinteraksi dengan instansi maupun lembaga lain yang terkait dengan struktur data yang berada dalam kewenangan instansi yang bersangkutan.

2. TUJUAN

Penelitian yang dilakukan terkait dengan rancangan aplikasi *e-Government*, bertujuan memberikan landasan berpikir dalam pengembangan sistem aplikasi *e-Government* yang komprehensif, efisien dan efektif.

3. LANDASAN TEORI

3.1 Peranan analisis dan perancangan sistem

¹Analisis dan perancangan sistem berupaya menganalisis input data atau aliran data secara sistematis, memproses atau mentransformasikan data, menyimpan data, dan menghasilkan output informasi dalam konteks bisnis kasus. Selanjutnya analisis dan perancangan sistem digunakan untuk menganalisis, merancang dan mengimplementasikan peningkatan-peningkatan fungsi bisnis yang bisa dicapai melalui penggunaan sistem informasi terkomputerisasi.

3.2 Siklus hidup pengembangan sistem

²Siklus hidup pengembangan sistem adalah pendekatan melalui beberapa tahap untuk menganalisis dan merancang sistem yang dimana sistem tersebut telah dikembangkan dengan sangat baik melalui penggunaan siklus kegiatan penganalisis dan pemakai secara spesifik. Berikut adalah tujuh siklus hidup pengembangan sistem :

- Mengidentifikasi masalah, peluang dan tujuan.
- Menentukan syarat-syarat informasi
- Menganalisis kebutuhan sistem
- Merancang sistem yang direkomendasikan
- Mengembangkan dan mendokumentasikan perangkat lunak
- Menguji dan mempertahankan sistem
- Mengimplementasikan dan mengevaluasi sistem.

3.3 Diagram aliran data


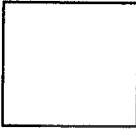


³Diagram aliran data memfokuskan pada aliran data dari dan kedalam sistem dan sekaligus memproses data-data tersebut. Komponen-komponen dasar dari setiap program computer ini bisa digambarkan secara mendetail dan

¹ Kendal & Kendal, **Analisis dan Perancangan Sistem Jilid 1**, PT Prenhallindo, 2003, hlm 7-8.

² Kendal & Kendal, **Analisis dan Perancangan Sistem Jilid 1**, PT Prenhallindo, 2003, hlm 11-15.

³ Kendal & Kendal, **Analisis dan Perancangan Sistem Jilid 1**, PT Prenhallindo, 2003, hlm 40.

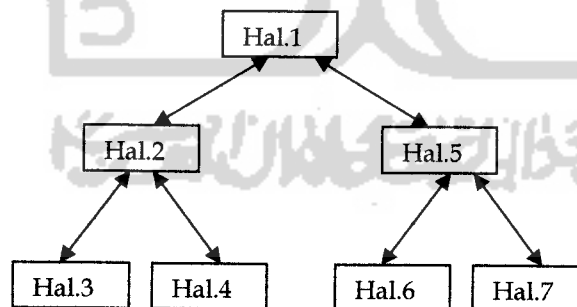
digunakan untuk menganalisis keakuratan dan kompetensi sistem. Berikut adalah simbol-simbol dasar dari diagram aliran data :

	Suatu proses dimana beberapa tindakan atau sekelompok tindakan dijalankan.
	Suatu entitas berupa orang, kelompok, departemen, atau sistem yang bisa menerima informasi atau data-data awal.
	Arus data yang menunjukkan bahwa informasi sedang melintas dari atau menuju suatu proses.
	Tempat data-data disimpan dalam database sistem.

Gambar 3.1 tabel symbol-simbol dasar diagram aliran data

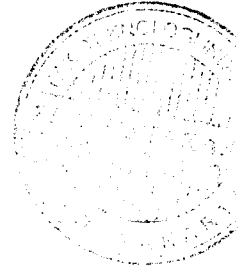
3.4 Struktur hirarki pendek/narrow hierarki

⁴Dalam pengorganisasian halaman situs web, struktur hirarki pendek menempatkan halaman-halaman isi menjadi lebih “dalam” atau lebih “masuk” kedalam. Maksudnya setiap level ada pembatasan jumlah halaman. Hal ini dilakukan agar jumlah halaman pada setiap level tidak terlalu banyak dan melebar. Gambar 3.2 akan mengilustrasikan bagaimana struktur hirarki pendek pada pengorganisasian halaman web.



Gambar 3.2 Struktur hirarki pendek/ narrow hierarki

⁴ Wahana Komputer, **Menjadi Seorang Desainer Web**, ANDI, 2005, hlm.147.



4. PERANCANGAN APLIKASI E-GOVERNMENT

Dalam melakukan perancangan aplikasi e-government akan memanfaatkan teknologi web sistem. Karena dengan aplikasi web sistem dapat diakses oleh pengguna 24 jam dan dapat menjangkau orang-orang ditempat yang berjauhan tanpa mengkhawatirkan zona waktu lokasi mereka.

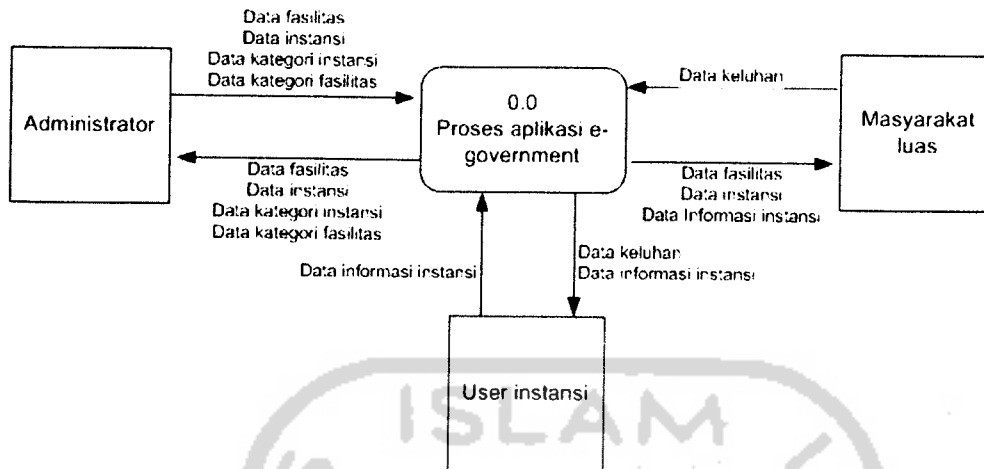
4.1 Gambaran sistem

Dalam perancangan aplikasi e-government ini memanfaatkan teknologi dan kemampuan yang ada pada website. Adapun fitur-fitur yang terdapat dalam perancangan ini adalah sebagai berikut:

- Masyarakat (user) dapat mencari lokasi dari fasilitas layanan masyarakat kota. Fasilitas yang dimaksud adalah informasi mengenai lokasi apotek, supermarket, agen travel, warnet, wartel dan sebagainya.
- Masyarakat dapat langsung menyampaikan keluhannya kepada suatu lembaga pemerintah melalui fitur keluhan yang ada pada website.
- Masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai prosedur dalam mendapatkan layanan pemerintah untuk setiap instansi yang ada.

4.2 Desain sistem

Didalam proses perancangan sistem aplikasi e-government ini disajikan dalam bentuk logical model dan menggunakan alat bantu Data Flow Diagram(DFD). Dengan menggunakan alat bantu DFD ini akan memungkinkan menggambarkan level yang paling tinggi ke level yang paling rendah dengan melakukan dekomposisi. Perancangan ini dimulai dari yang paling global yaitu diagram konteks, kemudian diagram konteks diturunkan sampai bentuk paling detail. Gambar 4.1 berikut adalah DFD level 0 aplikasi e-government.



Gambar 4.1 DFD level 0 aplikasi e-government

DFD level 0 proses aplikasi e-government diatas mempunyai dua terminator dan satu proses, dimana satu proses ini mencakup keseluruhan proses dalam aplikasi e-government. Terminator dalam sistem ini adalah:

1. Administrator

Administrator adalah seorang atau beberapa orang yang berwenang dan bertanggung jawab dalam melakukan segala macam perubahan, pengembangan dan keamanan pada sistem. Dalam rancangan aplikasi e-government ini, administrator memberikan hak akses untuk memasukkan informasi tiap instansi kepada user instansi. Administrator juga melakukan validasi pendaftaran nama instansi yang akan didaftarkan kedalam database situs web pemerintah dalam aplikasi e-government. Data fasilitas kota didaftarkan kedalam database oleh administrator untuk dimasukkan kedalam layanan informasi fasilitas kota yang dapat diakses melalui website.

2. User instansi

User instansi adalah pengguna system informasi yang ada dalam setiap lingkungan instansi pemerintah maupun swasta yang bertugas memasukkan informasi kedalam aplikasi e-governmen. User instansi memiliki hak akses yang diberikan oleh administrator untuk

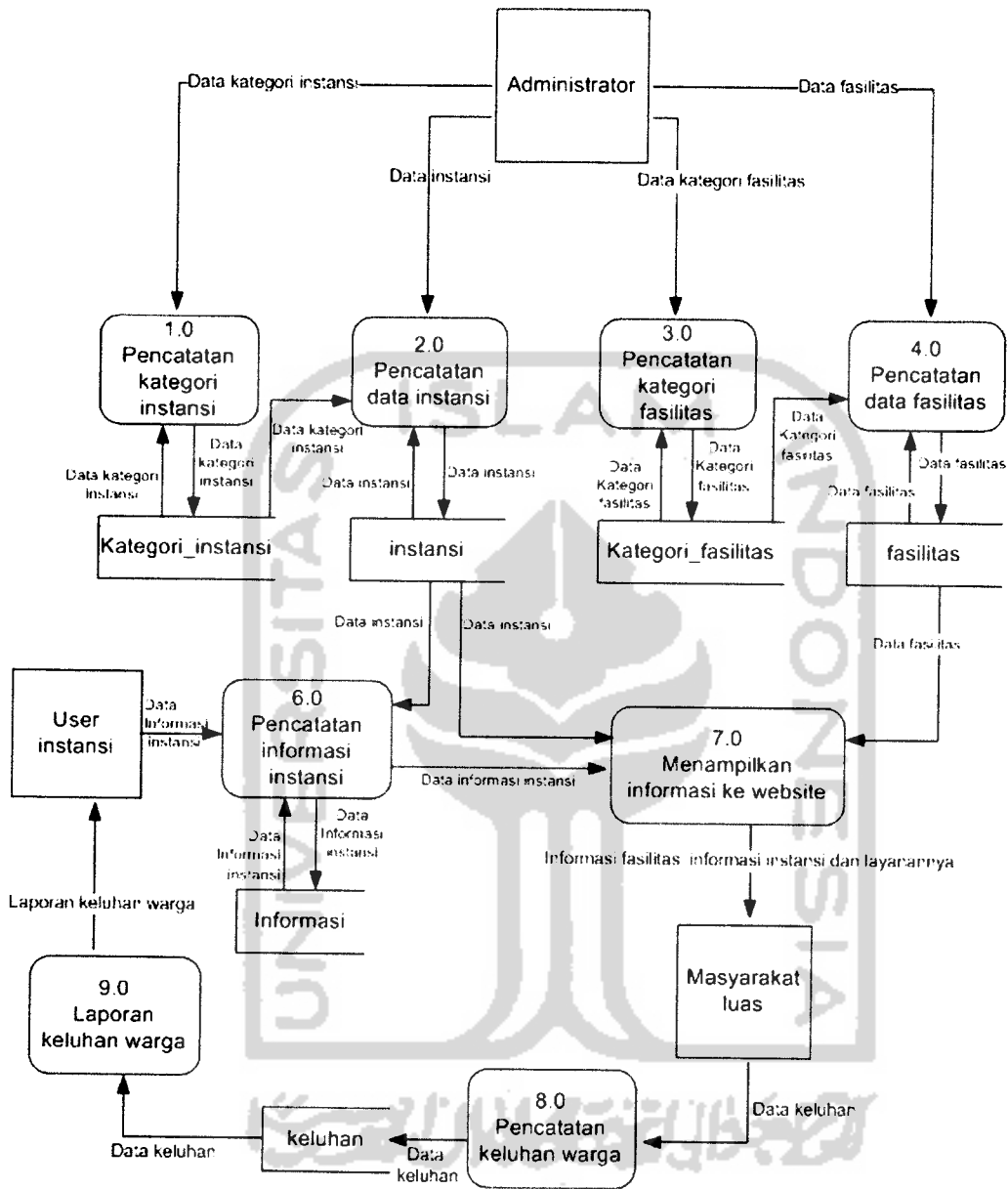
menambahkan informasi mengenai instansinya. User instansi akan menerima keluhan dari masyarakat luas dan melakukan verifikasi terhadap kelayakan etika dalam menulis.

3. Masyarakat luas

Masyarakat luas adalah pengunjung situs web pemerintah. Masyarakat luas dapat memperoleh informasi tentang fasilitas kota, lokasi dan layanan instansi serta dapat memasukkan saran dan kritik mengenai kinerja dari pemerintah.

Setelah membuat DFD level 0 untuk aplikasi e-government, langkah selanjutnya adalah menurunkan DFD level 0 diatas kedalam bentuk yang lebih spesifik yaitu dengan DFD level 1. Gambar 4.2 adalah DFD level 1 untuk proses aplikasi e-government.

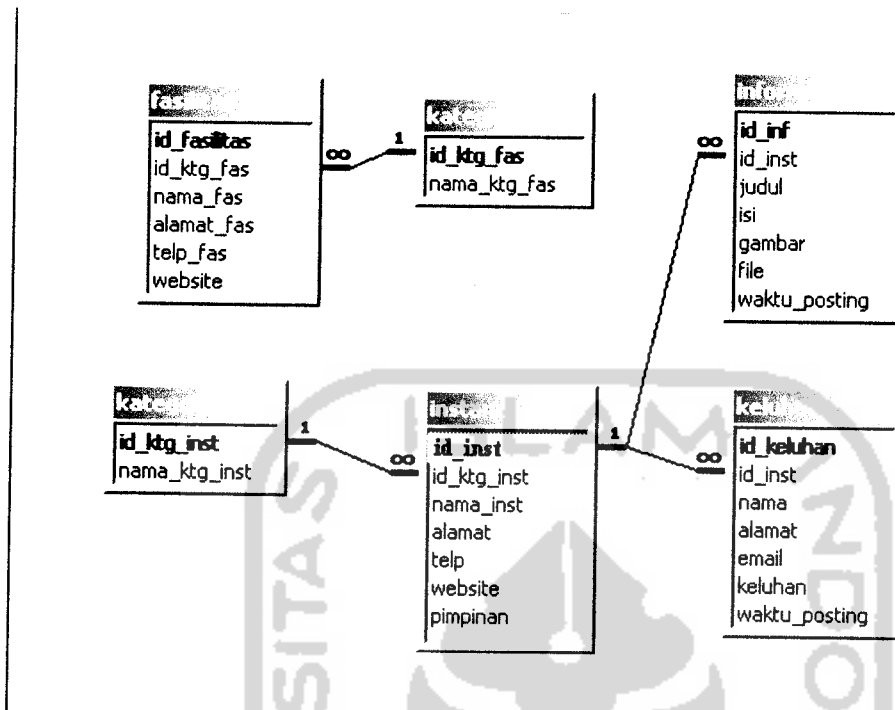




Gambar 4.2 DFD level 1 proses aplikasi e-government

4.3 Struktur tabel basis data

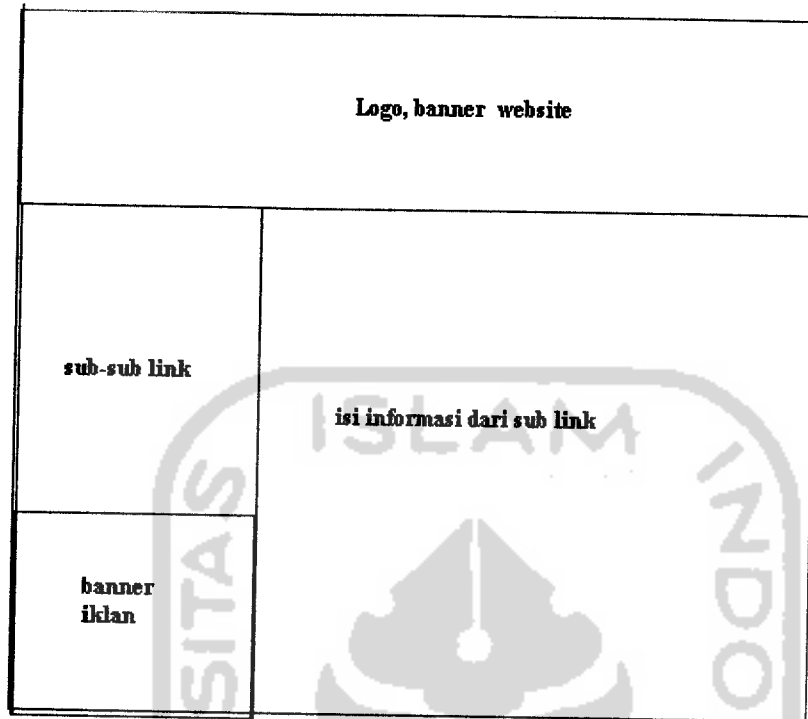
Struktur tabel akan menunjukkan keterkaitan antar table yang terkoordinasi dengan baik dalam sistem informasi. Gambar 4.3 adalah struktur tabel untuk aplikasi e-government.



Gambar 4.3 Struktur tabel aplikasi e-government

4.4 Desain antarmuka website

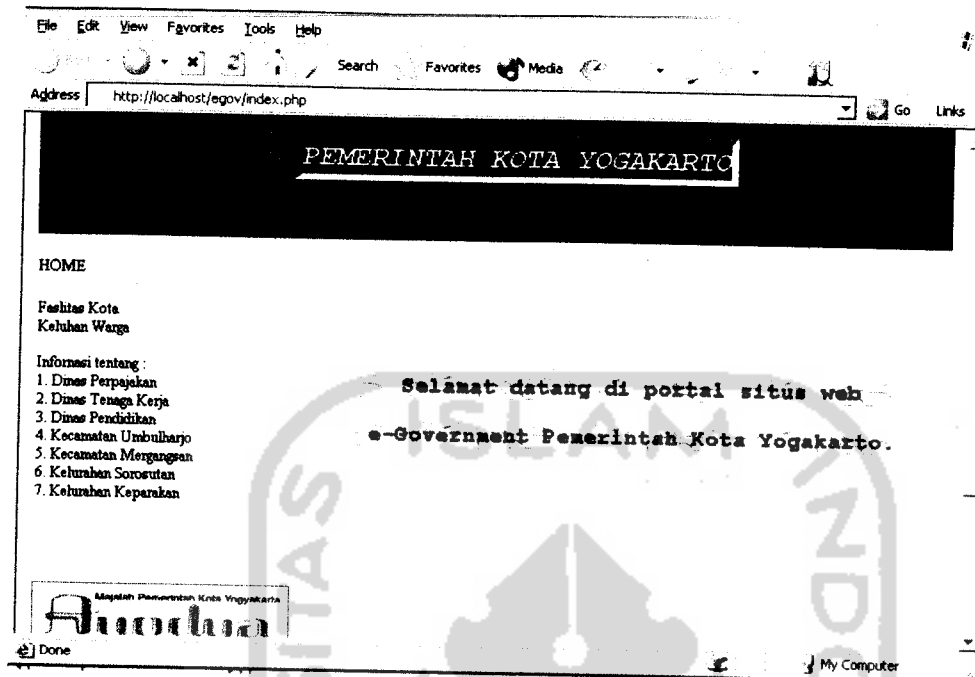
Desain antarmuka website diperlukan untuk menentukan posisi dari komponen-komponen informasi yang akan ditampilkan pada halaman situs web. Gambar 4.4 berikut menunjukkan susunan dari posisi komponen-komponen informasi dalam perancangan aplikasi e-government.



Gambar 4.4 Tampilan antarmuka website

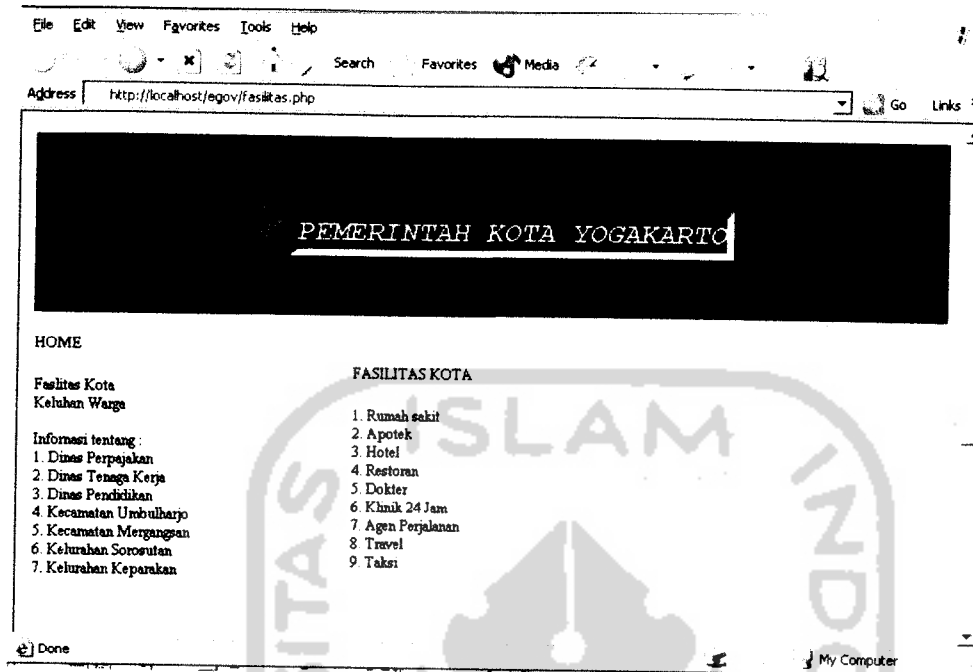
5. IMPLEMENTASI APLIKASI E-GOVERNMENT

Implementasi aplikasi e-Government berikut adalah merupakan hasil rancangan dari aplikasi e-Government yang telah dibuat. Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan implementasi terhadap portal situs web pemerintah yang dibuat, penulis lebih mengedepankan kecepatan akses dengan mengurangi penggunaan gambar yang berlebihan dan tidak menggunakan animasi. Dengan implementasi ini diharapkan masyarakat luas dapat mempermudah dalam mengakses informasi yang ada di daerahnya serta dapat ikut langsung berpartisipasi dalam menyampaikan saran dan kritik terhadap kinerja dari pemerintah. Gambar 5.1 berikut merupakan tampilan awal dari implementasi situs web pemerintah.



Gambar 5.1 Tampilan awal implementasi website e-Government

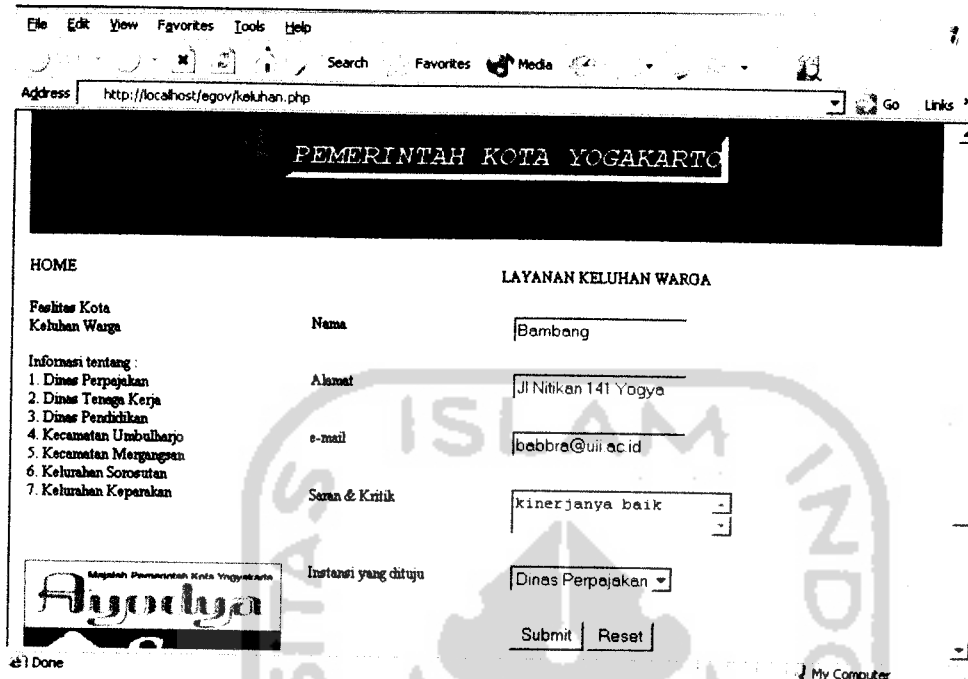
Dari tampilan awal dari implementasi diatas terdapat beberapa sub link yang berfungsi sebagai navigasi website dalam mengakses berbagai informasi dan layanan yang diberikan. Gambar 5.2 berikut adalah tampilan website yang menginformasikan tentang layanan yang ada di kota.



Gambar 5.2 Tampilan informasi fasilitas kota

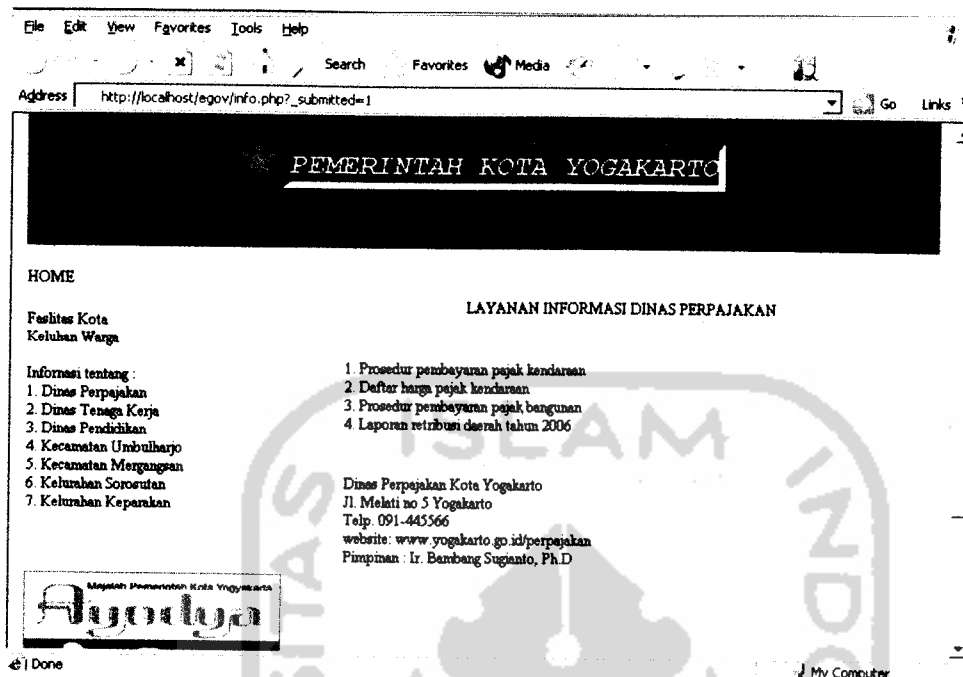
Dari tampilan gambar 5.2 diatas, masyarakat luas dapat mengetahui informasi tiap link dari fasilitas kota yang ada. Informasi yang diperoleh antara lain nama dari fasilitas kota, lokasi, telepon.

Tampilan gambar 5.3 berikut masyarakat dapat langsung berpartisipasi dalam memberikan kritik dan saran kepada instansi pemerintahan terkait. Dari layanan keluhan ini diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kinerjanya.



Gambar 5.3 Tampilan layanan keluhan warga

Dalam menginformasikan prosedur yang harus dilakukan masyarakat untuk mendapatkan layanan dari tiap instansi, layanan informasi instansi pada gambar 5.4 berikut menjadi solusi atas permasalahan diatas.



Gambar 5.4 Tampilan informasi dari Dinas Perpajakan

Gambar 5.4 diatas menggambarkan tampilan informasi yang ada pada dinas perpajakan. Tampilan diatas merupakan gambaran dari tampilan layanan informasi yang di-inputkan oleh user instansi yang ada pada tiap instansi.

6. PENUTUP

Dari bahasan diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam melakukan perancangan aplikasi e-government harus mengedepankan aspek manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Dengan perancangan aplikasi yang baik diharapkan tujuan dari e-government dapat tercapai dengan baik. Pemanfaatan teknologi internet telah membantu dalam perancangan dan implementasi e-government, dimana user dapat mengakses informasi dengan tidak memperhatikan lokasi dan waktu user itu berada.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Rakhmat. (2002), "**Kajian Pengembangan e-Government di Indonesia : Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Kutai Timur**". Diakses dari <http://digilib.itb.ac.id/go.php?id=jbptitbpp-gdl-s2-2002-rakhmat-1719-e-goverme>, pada tanggal 10 November 2006
- Indrajit, Richardus Eko. (2002) "**Electronic Government, Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital**", ANDI, Yogyakarta.
- Indrajit, Richardus Eko. (2005) "**e-Government In Action, Ragam Kasus Implementasi Sukses Di Berbagai Belahan Dunia**", ANDI, Yogyakarta.
- Kendal & Kendal. (2003) "**Analisis Dan Perancangan Sistem Jilid 1**", PT Prenhallindo, Jakarta.
- Nurchahyo, Bambang. (2004) "**Elemen-elemen e-Government**", Pusat Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Raharjo, Budi. (2001), "**Membangun e-Government**". Diakses dari <http://www.cert.or.id/~budi/articles/e-gov-makassar.doc>, pada tanggal 26 November 2007.
- Setiawati, Wenny. (2004), "**PENERAPAN e-GOVERNMENT DI INDONESIA**". Diakses dari http://www.lkht.net/artikel_pertopik.php?subtema=e-government, pada tanggal 10 November 2006.
- Soenjojo, Hadwi. (2004), "**KUNJUNGAN SITUS WEB PEMERINTAH DAERAH**". Diakses dari http://www.kenarok.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=9, pada tanggal 10 November 2006.
- Soenjojo, Hadwi. (2005), "**Implementasi e-Government Sejumlah Pemerintah Daerah**". Diakses dari <http://www.depkominfo.go.id/download/EgovPemda.pdf>, pada 26 November 2006.
- Tim PPTI. Pembekalan Materi Telematika Sistem Informasi Nasional dan e-Government. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2003.

Tim Survei e-Government Warta Ekonomi. (2004), "**Data Insfrastruktur**". Diakses dari <http://www.wartaekonomi.com/egov/infrastruktur.asp>, pada 26 November 2006.

Wahana Komputer .(2005) "**Menjadi Seorang Desainer Web**", ANDI, Yogyakarta.

